

Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP



Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Keterkaitan Perencanaan-Penganggaran-Kinerja
- Manajemen Kinerja
- RPJMN 2015-2019
- Review Renstra BPOM 2015-2019

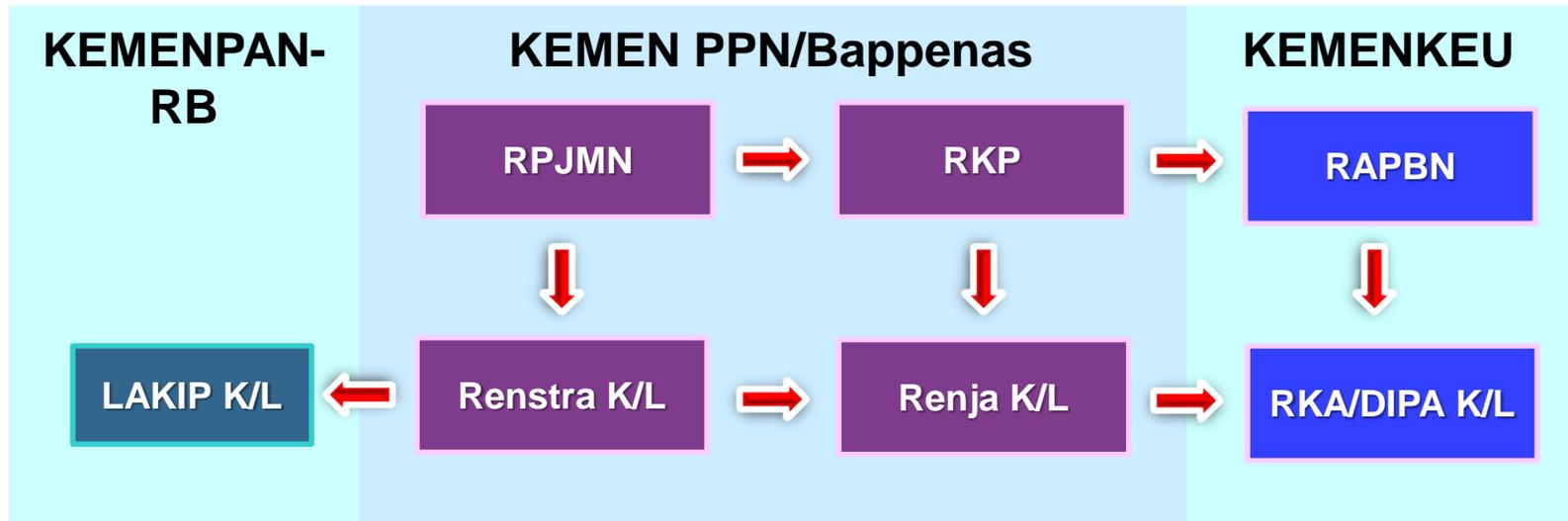


BADAN POM RI

Siklus Manajemen Pembangunan

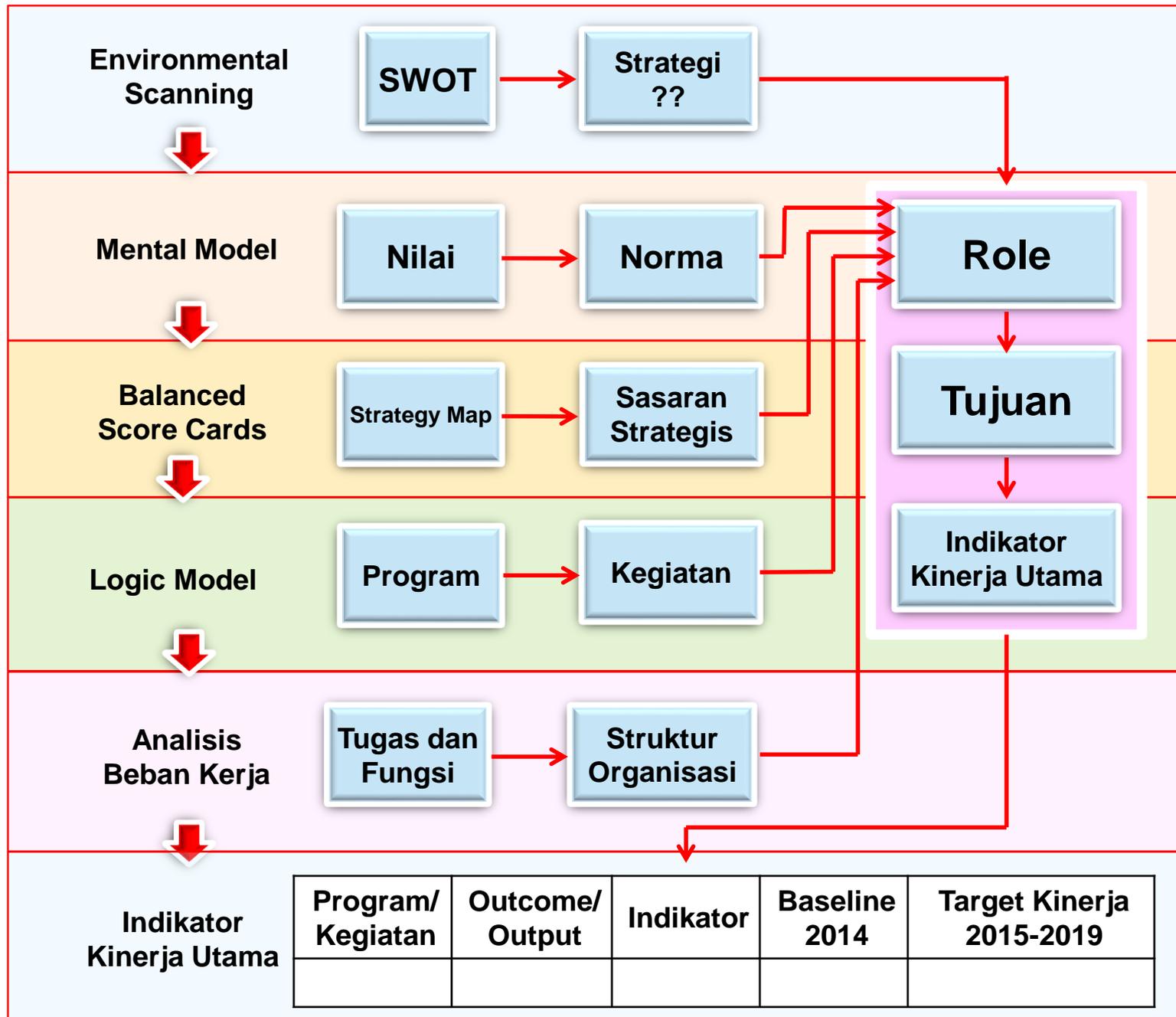


Keterkaitan Perencanaan-Penganggaran-Kinerja



Manajemen Kinerja

- Organisasi
- Tatalaksana
- Peraturan Per-UU-an
- SDM Aparatur
- Pengawasan
- Akuntabilitas
- Pelayanan Publik
- Mindset & Cultural Set Aparatur



Indikator Kinerja Utama

Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline 2014	Target Kinerja 2015-2019

RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 5/2015



Dasar Hukum

Penyusunan RPJMN 2015-2019

1. UU 25/2004 tentang SPPN:

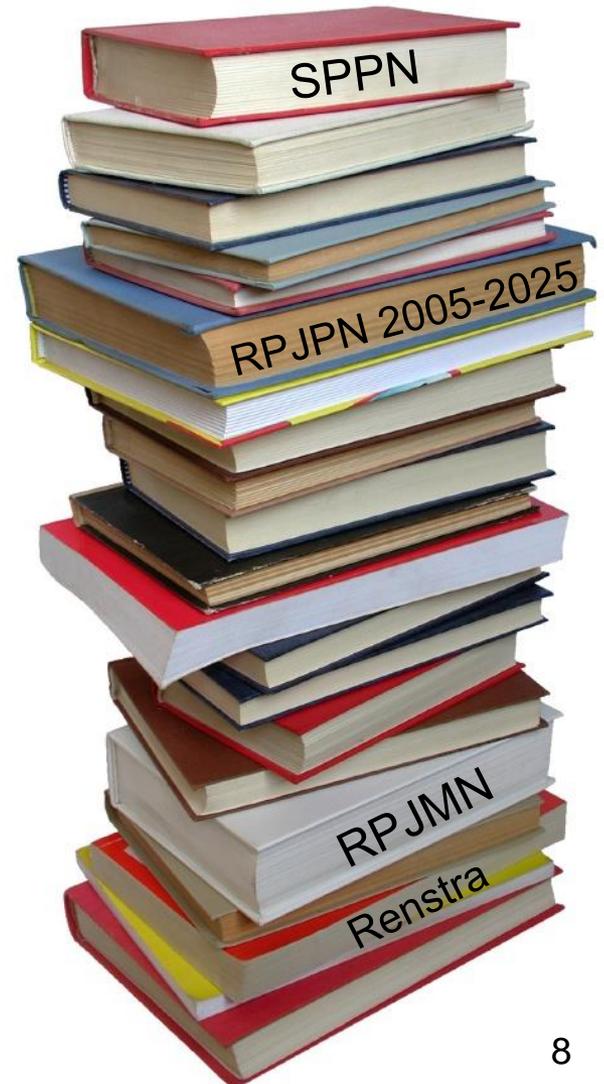
Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



Dokumen RPJMN 2015-2019



BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
5. Kebijakan Pembangunan Nasional
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Kalimantan
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan **kualitas hidup manusia Indonesia** yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup **Manusia dan Masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Trisakti

I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Trisakti

II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

Trisakti

11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	--	--	---	---

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

<p>1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)</p> <p>2. Memperkuat sistem pertahanan negara (4)</p> <p>3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8)</p> <p>4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)</p>	<p>5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7)</p> <p>6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)</p> <p>7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11)</p> <p>8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)</p>	<p>9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6)</p> <p>10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7)</p> <p>11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42)</p> <p>12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)</p>	<p>1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM</p> <p>2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan</p> <p>3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas.</p> <p>4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.</p>	<p>5. Membangun pemberdayaan buruh</p> <p>6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional</p> <p>7. Penguatan investasi domestik</p> <p>8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara</p> <p>9. Membangun infrastruktur</p>	<p>10. Membangun ekonomi maritim</p> <p>11. Penguatan sektor kehutanan</p> <p>12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan</p> <p>13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan</p> <p>14. Membangun karakter dan potensi wisata</p> <p>15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional</p> <p>16. Pengembangan industri manufaktur</p>	<p>1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa</p> <p>2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial</p> <p>3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga</p>
--	---	---	---	---	---	---

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk **manusia dan masyarakat**;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

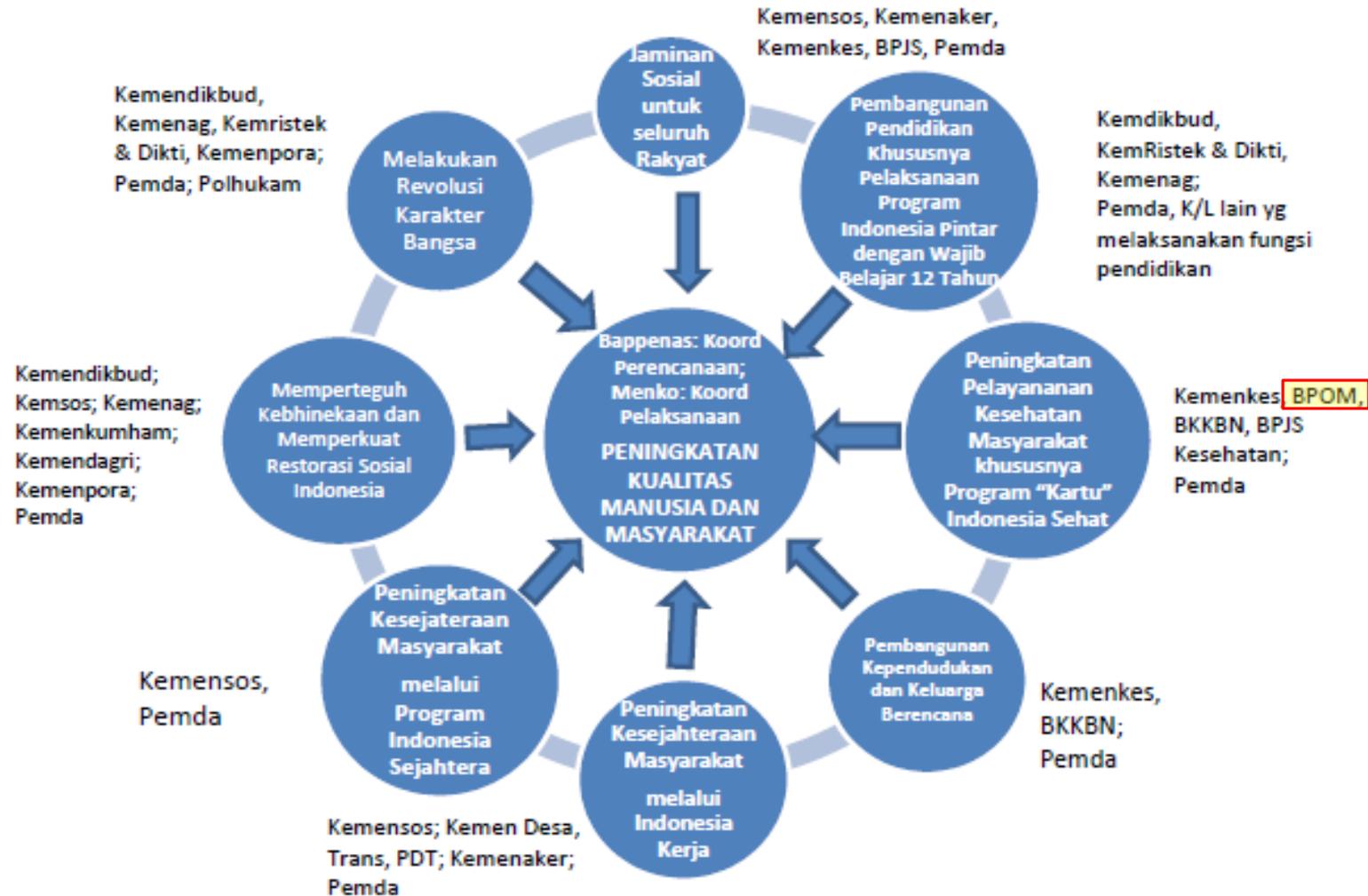
Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Pembangunan Manusia Masyarakat



Dokumen RPJMN 2015-2019

BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

→ Bab 2 Kondisi Umum

→ 2.2 Permasalahan dan Tantangan

→ 2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan

→ G. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

→ 1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat:

→ **Meningkatkan pengawasan obat dan makanan**



Dokumen RPJMN 2015-2019

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

→Bab 2: Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

→2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

**→5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan**

→2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

→2.3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

**→7. Meningkatkan pengawasan obat dan
makanan**

→2.4 Kerangka Pendanaan

→2.4.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→2.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

→2.5.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Lanjutan ...

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→**5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan**

Permasalahan yang dihadapi:

- ketersediaan obat dan alat kesehatan,
- mutu pelayanan,
- penggunaan obat di tingkat masyarakat.
- Manajemen supply chain:
 - kualitas fasilitas dan sarana,
 - kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, distribusi, manajemen stok, dan mutu
 - pengelolaan persediaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota,
 - sistem data dan informasi persediaan dan penggunaan obat di instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang lemah.

Lanjutan ...

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan

- Ketersediaan obat dan vaksin secara umum telah cukup baik yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013, namun, ketersediaan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai.
- variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tinggi dengan 13 provinsi melebihi 100 persen (misalnya Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta), sedangkan di beberapa provinsi lainnya masih di bawah 80 persen (Maluku, Gorontalo, dan Kepulauan Riau).
- Persentase obat, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan terus meningkat.
- Walaupun demikian, hanya 67,8 persen sarana produksi obat (tahun 2013) dan hanya 64,7 persen sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices terkini dan memenuhi cara produksi yang baik (Good Manufacturing Practices).

Lanjutan ...

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→**5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan**

- Walaupun penggunaan obat generik di sarana kesehatan terus meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah baru mencapai 61,9 persen.
- Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik.
- Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam negeri, hampir 90 persen kebutuhan obat dapat diproduksi dalam negeri, namun hampir 96 persen bahan baku industri farmasi masih sangat tergantung dengan bahan baku impor.
- Pemenuhan alat kesehatan (alkes) juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap industri alkes luar negeri.

Lanjutan ...

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

**→5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan**

- Tingkat ketergantungan ini dapat diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di bidang obat dan alkes dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dan alkes dalam negeri yang didukung oleh riset terkait bahan baku obat terutama bahan baku obat kimia.
- Selain itu, kemandirian pemenuhan bahan baku obat (BBO) juga perlu didukung dengan pengembangan bahan baku obat tradisional terutama pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam negeri.
- Untuk menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku obat, perlu juga penguatan jejaring antara perguruan tinggi, swasta, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka riset dan penguatan industri obat.

Lanjutan ...

→2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

**→5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan**

Tantangan yang dihadapi

- menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan khasiat obat dan alat kesehatan hingga di fasilitas kesehatan dan pasien,
- peningkatan supply chain dan monitoring (termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan teknologi informasi),
- peningkatan penggunaan obat generik dan obat rasional melalui peningkatan persepsian, penggunaan, dan pengetahuan masyarakat.
- eksplorasi dalam penetapan dan pengendalian harga obat misalnya melalui berbagai insentif fiskal dan finansial.
- Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat serta peningkatan daya saing produk obat, alat kesehatan, dan makanan, termasuk penguatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum.
- Tantangan dalam hal kemandirian penyediaan bahan baku obat adalah perlunya penguatan dan pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri termasuk bahan baku obat tradisional dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam negeri serta penguatan jejaring stakeholder terkait.

Lanjutan ...

→2.3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→7. **Meningkatkan pengawasan obat dan makanan**

- a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
- b. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
- c. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan;
- d. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
- e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; dan
- f. penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.

Lanjutan ...

→2.3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

→**7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan**

Arah Kebijakan dan Strategi:

1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.

Kerangka Pendanaan

1. Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (*earmarked*); dan
 - c. Peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).
2. Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui:
 - a. Pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatan melalui peningkatan sinergi perencanaan pusat dan daerah, perencanaan berbasis bukti (data kesehatan dan hasil evaluasi pembangunan), serta pengelolaan anggaran kesehatan yang lebih fokus pada upaya pencapaian prioritas nasional pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - c. Pengelolaan dan pengembangan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pemanfaatan yang lebih tepat sasaran.

→2.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

→2.5.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kerangka Regulasi

1. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan terkait karantina kesehatan, wabah penyakit menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat;
2. Penyusunan berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan jaminan kesehatan nasional termasuk dalam kepesertaan, pengelolaan, pembayaran penyedia layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasinya;
3. Penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK;
4. Penyusunan dan sinkronisasi peraturan sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur pembangunan kesehatan;
5. Penguatan peraturan perundangan yang terkait sistem kesehatan, rekam medis, dan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah; dan
6. Penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong terlaksananya *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat.

Kerangka Kelembagaan

1. Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk melalui pengembangan riset operasi dan sistem pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan, studi efektifitas, dan pengembangan mekanisme penguatan sistem informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat;
3. Penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan, peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk pembangunan kesehatan termasuk pangan dan gizi dan penanggulangan HIV/AIDS; dan
4. Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (*health technology assesment/HTA*) dan pertimbangan klinik (*clinical advisory*).

Matriks RPJMN 2015-2019 BPOM

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	01		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPOM		
				Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	
063	01				Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM
063	01				Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK
063	01				Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN
063	01	3157	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat		
063	01	3157		Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan	

TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)
2015	2016	2017	2018	2019	
					758,2
B	BB	A	A	AA	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
B	A	A	A	A	
					56,5

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	01	3157			Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan
063	01	3157			Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti
063	01	3157		Terselenggaranya layanan pertimbangan/opini hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum	
063	01	3157			Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (layanan)
063	01	3157		Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan	
063	01	3157			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun
063	01	3158	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM		
063	01	3158		Terselenggaranya koordinasi kerjasama luar negeri di bidang obat dan makanan	
063	01	3158			Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	01	3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan		
063	01	3159		Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	
063	01	3159			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
063	01	3159		Terselenggaranya penataan kelembagaan BPOM sesuai rencana induk	
063	01	3159			Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
063	01	3160	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM		
063	01	3160		Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta operasional perkantoran	
063	01	3160			Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3
063	01	3160			Jumlah dokumen <i>Human Capital Management</i>

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	01	3160			Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
063	01	3160			Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik
063	01	3161	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan		
063	01	3161		Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
063	01	3161			Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
063	01	3162	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi		
063	01	3162		Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara <i>online</i> dan <i>up-to-date</i> untuk pengawasan obat dan makanan	
063	01	3162			Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi <i>e-gov</i> bisnis proses BPOM
063	01	3162			Jumlah informasi obat dan makanan yang <i>up-to-date</i> sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan
063	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BPOM		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	02			Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	
063	02				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar
063	02	3163	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM		
063	02	3163		Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM	
063	02	3163			Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa (laporan)
063	02	3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM		
063	02	3164		Terselenggaranya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang di Badan POM serta pembinaannya	
063	02	3164			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar
063	02	3164			Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
063	06		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06			Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	
063	06				Persentase obat yang memenuhi syarat
063	06				Persentase makanan yang memenuhi syarat
				Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	
					Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
					Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
063	06	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM		
063	06	3165		Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3165			Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
063	06	3165			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
063	06	3165			Pemenuhan target <i>sampling</i> produk obat di sektor publik (IFK)
063	06	3166	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan		
063	06	3166		Meningkatnya mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP)	
063	06	3166			Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3166			Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti
063	06	3166			Persentase berkas permohonan sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu
063	06	3166			Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
063	06	3166			Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan
063	06	3167	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan		
063	06	3167		Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	
063	06	3167			Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3167			Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
					Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
063	06	3168	Pengembangan Obat Asli Indonesia		
063	06	3168		Meningkatnya ketersediaan informasi, pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak terkait	
063	06	3168			Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI
063	06	3169	Pengawasan Distribusi Obat		
063	06	3169		Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar	
063	06	3169			Persentase peningkatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3166			Jumlah kajian farmakovigilance obat beredar yang dikomunikasikan
063	06	3170	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		
063	06	3170		Menurunnya jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor	
063	06	3170			Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
063	06	3170			Persentase penyelesaian pemberian sanksi TL tepat waktu terhadap sarana pengelola NPP yang tidak memenuhi ketentuan
063	06	3170			Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu (persen)
063	06	3171	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3171		Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	
063	06	3171			Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
063	06	3172	Pengawasan Produksi Obat		
063	06	3172		Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini	
063	06	3172			Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu
					Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
063	06	3173	Penilaian Pangan Olahan		
063	06	3173		Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi)	
063	06	3173			Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3174	Penilaian Obat		
063	06	3174		Tersedianya obat yang memenuhi standar	
063	06	3174			Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan
063	06	3175	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
063	06	3175		Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi kriteria sebelum produk dipasarkan	
063	06	3175			Persentase keputusan penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan
063	06	3176	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3176		Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dapat menjamin produk aman, berkhasiat dan bermutu	
063	06	3176			Jumlah Standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun
063	06	3177	Penyusunan Standar Pangan		
063	06	3177		Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu	
063	06	3177			Jumlah standar pangan yang disusun
063	06	3178	Penyusunan Standar Obat		
063	06	3178		Tersusunnya standar obat dalam rangka menjamin obat yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	
063	06	3178			Jumlah standar obat yang disusun
063	06	3179	Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3179		Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	
063	06	3179			Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan
063	06	3179			Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP
063	06	3179			Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan
063	06	3180	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM		
063	06	3180		Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar	
063	06	3180			Persentase pemenuhan Laboratorium Balai Besar/Balai POM yang sesuai persyaratan <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG	KEG			
063	06	3180			Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu
063	06	3181	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan		
063	06	3181		Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	
063	06	3181			Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan
063	06	3181			Jumlah perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
063	06	3182	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan		
063	06	3182		Meningkatnya hasil riset di bidang pengawasan obat dan makanan	
063	06	3182			Jumlah riset laboratorium dan kajian yang dimanfaatkan



Review Renstra BPOM 2015-2019

Review Renstra BPOM

Bab I Pendahuluan	√
1.1. Kondisi Umum	√
1.2. Potensi Permasalahan	√
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM	√
2.1. Visi	√
2.2. Misi	√
2.3. Tujuan	√
2.4. Sasaran Strategis	√
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	√
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	√
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	√
3.3. Kerangka Regulasi	√
3.4. Kerangka Kelembagaan	√
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	√
4.1. Target Kinerja	√
4.2. Kerangka Pendanaan	√
Bab V Penutup	√
Lampiran	
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPOM	√
2. Matriks Kerangka Regulasi	√

Delapan Langkah Penyusunan Renstra BPOM





1. Persiapan Penyusunan Renstra BPOM

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi selama periode 2015-2019.	√
2. Identifikasi asas legal bagi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya. - sebagai gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan BPOM terhadap kondisi umum yang dihadapi.	√
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan BPOM.	√
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra BPOM.	√

2.

Identifikasi Kondisi Umum BPOM

- 1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan** yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPOM 2009-2014.
- 2. Hasil Aspirasi Masyarakat** dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan BPOM.
 - Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan BPOM harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.

√

√

2.

Analisis Potensi dan Permasalahan BPOM

1. Analisa SWOT
2. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan BPOM,
3. Penjaringan aspirasi masyarakat,
4. Identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya,
5. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi

√

√

√

√

√



VISI

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan dan Daya Saing Bangsa”

MISI

- 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.**
- 2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

3.

Review Visi BPOM

- | | |
|---|---|
| 1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BPOM pada akhir periode perencanaan. | √ |
| 2. Memberikan gambaran konsistensi kinerja BPOM selama 5 tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi BPOM. | √ |
| 3. Memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi BPOM; | √ |
| 4. Memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi BPOM; | √ |
| 5. Ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; | √ |
| 6. Dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; | √ |
| 7. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; | √ |
| 8. Selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel. | √ |

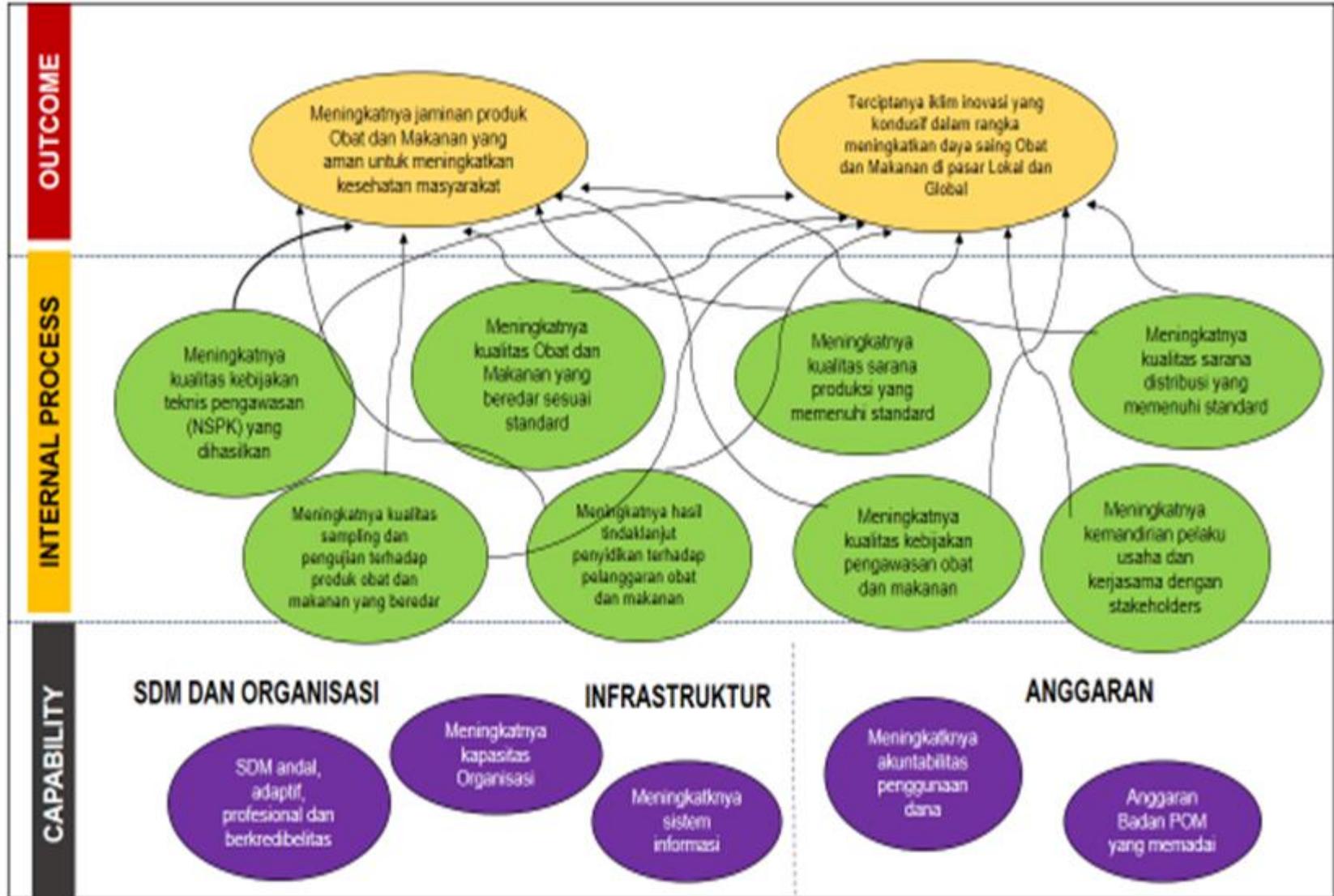
3.

Review Misi BPOM

1. Upaya pencapaian visi organisasi BPOM dan berlaku pada periode tertentu;	√
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait;	√
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi BPOM atau bersifat unik terhadap organisasi BPOM lainnya;	√
4. Menjembatani penjabaran Visi BPOM ke dalam Tujuan BPOM.	√

Strategy Map BPOM

VISI : Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat Dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat, 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat
	Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya, 2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, 3. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, 4. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, 5. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat, dan 6. Persentase pencapaian kerja sama terhadap target kerja sama yang ditetapkan.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3. Nilai LAKIP BPOM dari MENPAN

Arah Kebijakan dan Strategi

- **Arah Kebijakan: Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

- **Strategi**

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan;
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

- **Indikator :**

	Status Awal	Target 2019
1. Persentase obat yang memenuhi syarat	96,8	99,0
2. Persentase makanan memenuhi syarat	87,6	90,1

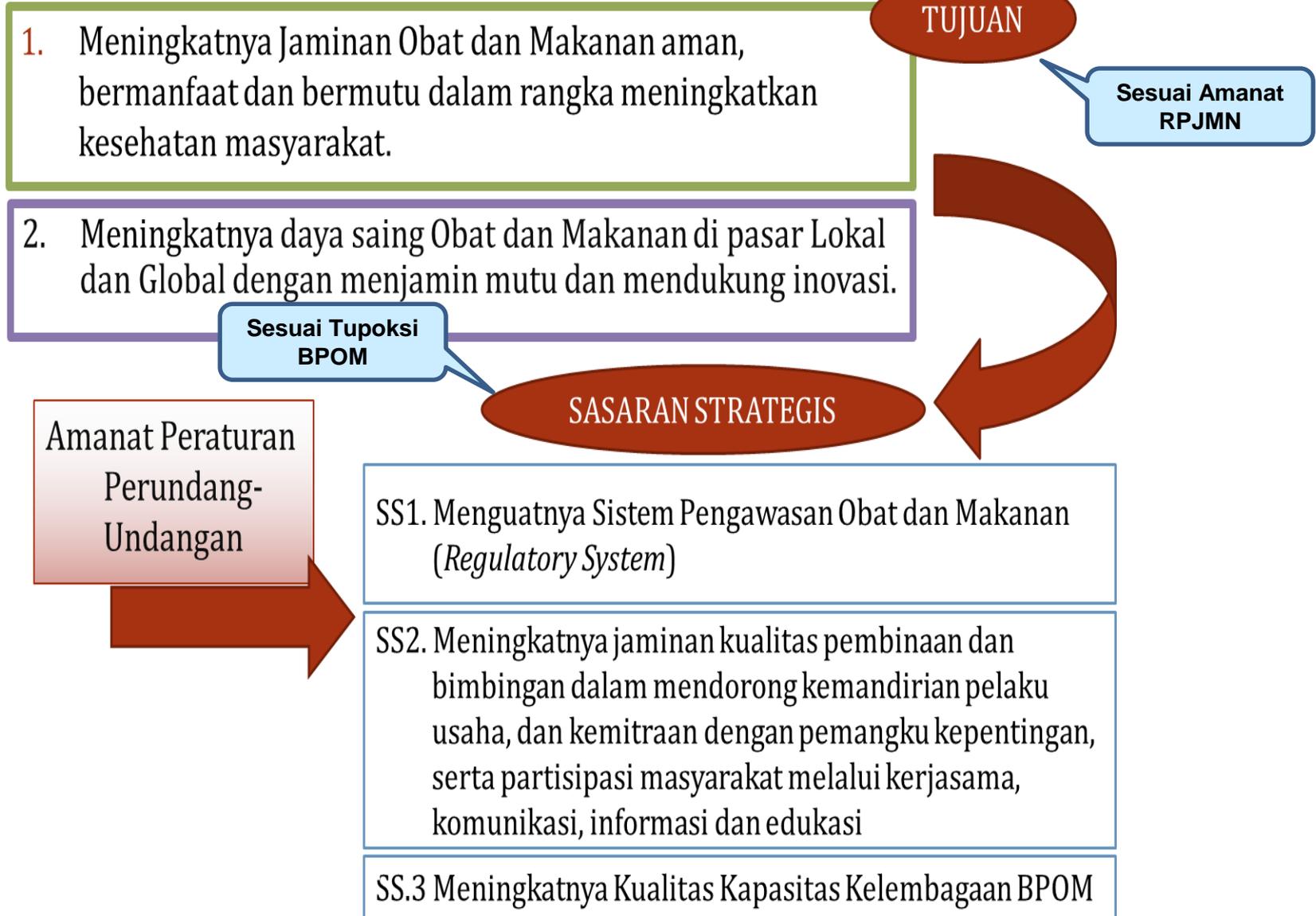


Review Tujuan BPOM



1. Sejalan dengan Visi dan Misi organisasi BPOM dan berlaku pada periode jangka menengah;	v
2. Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;	v
3. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh BPOM;	v
4. Mengarahkan perumusan: <ul style="list-style-type: none">• Sasaran Strategis,• Arah Kebijakan,• Strategi,• Program,• Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi BPOM	v

Tujuan dan Sasaran



4.

Review Indikator Sasaran Strategis BPOM

1. Dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BPOM	√
2. Setiap sasaran strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran strategis.	√
3. Dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi BPOM	√
4. Sesuai dengan visi, misi, dan tugas fungsi BPOM.	√
5. Memenuhi kriteria SMART:	√
<ul style="list-style-type: none"> • Specific: indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan; 	√
<ul style="list-style-type: none"> • Measurable: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; 	√
<ul style="list-style-type: none"> • Achievable: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai; 	√
<ul style="list-style-type: none"> • Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan 	√
<ul style="list-style-type: none"> • Time Bond: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan. 	√

Review Renstra BPOM

Bab I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Menggambarkan mengenai:

- Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam renstra K/L periode sebelumnya,
- Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.

1.2. Potensi Permasalahan

Menjelaskan mengenai:

- analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun nasional
- yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L serta
- untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Review Renstra BPOM

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2.1. Visi | Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. |
| 2.2. Misi | Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. |
| 2.3. Tujuan | Tujuan adalah penjabaran dari visi |
| 2.4. Sasaran Strategis | Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan. |

Review Renstra BPOM

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L terkait dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

- Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- Arah kebijakan K/L dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan K/L yang bersangkutan.
- Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing Program.

Review Renstra BPOM

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.3. Kerangka Regulasi

- Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L.
- Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Review Renstra BPOM

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

4.2. Kerangka Pendanaan

- Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis K/L, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.
- Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR.
- Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju

Review Renstra BPOM

Bab IV Penutup

- Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra K/L yang telah disusun
- arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L.
- Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis K/L yang bersangkutan.

Lampiran

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L
2. Matriks Kerangka Regulasi



Terima Kasih